

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pasar modal merupakan sistem keuangan yang terorganisir dan pasar terorganisasi yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (unit defisit atau emiten) dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus atau investor). Dalam pengertian klasik, pasar modal adalah bidang usaha perdagangan efek seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Menurut Kamus Hukum Ekonomi, pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan surat berharga jangka panjang, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mencakup kegiatan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi terkait (Mas Rahmah, 2019)

Secara fundamental, pasar modal berperan sebagai lembaga perantara (*intermediary*). Melalui mekanisme ini, dana yang semula mengendap di masyarakat dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif, menciptakan alokasi sumber daya finansial yang efisien untuk mendukung aktivitas ekonomi secara luas. Dalam konteks makroekonomi, pasar modal adalah indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. Keberadaan pasar modal yang maju memungkinkan pemerintah dan sektor swasta membiayai proyek-proyek strategis tanpa hanya bergantung pada pinjaman perbankan. Selain itu, ia berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan melalui kepemilikan saham oleh masyarakat umum, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap fluktuasi global (OJK, 2022).

Di Indonesia, pasar modal dilaksanakan secara kelembagaan oleh Bursa Efek Indonesia yang menjadi ruang terjadinya transaksi jual beli surat berharga, saham, dan instrumen investasi jangka Panjang. Hal ini juga telah diatur dalam undang-undang no.8 tahun 1995. Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki peran

strategis dalam sistem pasar modal Indonesia sebagai lembaga yang menyelenggarakan dan mengawasi perdagangan efek secara teratur, wajar, dan efisien. BEI berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui penerbitan saham dan obligasi, sehingga perusahaan memperoleh sumber pembiayaan jangka panjang untuk ekspansi usaha, investasi, dan peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, BEI memfasilitasi transaksi jual beli sekuritas antara investor, menyediakan likuiditas pasar, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Melalui peran tersebut, BEI berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena dana yang dihimpun dari publik dapat dialokasikan ke sektor-sektor produktif yang mendorong peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat (Juliati, 2015).

Kinerja Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan erat dengan arah kebijakan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah, baik fiskal maupun moneter, sangat menentukan iklim investasi di pasar modal, terutama kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan insentif bagi investor. Selain itu, kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar memengaruhi kepercayaan dan keputusan investor. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah sentimen pasar, kinerja keuangan perusahaan tercatat, perkembangan global dan perdagangan internasional, serta kemajuan teknologi dan inovasi di sektor keuangan. Likuiditas pasar serta kualitas regulasi dan infrastruktur perdagangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan daya tarik BEI, sehingga secara keseluruhan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Dewanda & Nelonda, 2026).

Tonggak awal pasar modal di Indonesia dimulai pada masa Hindia Belanda, tepatnya 14 Desember 1912, melalui pendirian cabang *Amsterdamse Effectenbeurs* di Batavia dengan nama *Vereniging voor de Effectenhandel*. Bursa ini merupakan yang tertua keempat di Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan

Tokyo, dengan fokus pada perdagangan saham/obligasi perusahaan Belanda dan surat utang pemerintah kolonial. Namun, aktivitas ini sempat terhenti pada tahun 1940 akibat Perang Dunia II (BEI, 2007).

Pasca kemerdekaan, pemerintah menerbitkan UU Darurat Nomor 13 Tahun 1951 (ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 1952) untuk menghidupkan kembali pasar modal. Namun, faktor politik konfrontatif dan rendahnya literasi investasi membuat pasar kembali lesu hingga pertengahan 1970-an. Revitalisasi baru terjadi pada tahun 1977 melalui Keppres Nomor 52 Tahun 1976, ditandai dengan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Pertumbuhan pesat mulai terlihat pada akhir 1980-an dengan pembentukan Bursa Efek Surabaya (BES) tahun 1989 dan swastanisasi Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 1992. Penguatan peran BEJ dan BES sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) semakin kokoh sejak pemberlakuan UU No. 8 Tahun 1995, yang dibarengi kemajuan teknologi seperti *Jakarta Automated Trading System* (JATS) pada 1995, perdagangan tanpa warkat pada 2001, serta *remote trading* pada 2002 (BEI, 2007).

Memasuki tahun 1990-an hingga awal 2000-an, BEJ dan BES beroperasi terpisah. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, pemerintah mendorong penggabungan keduanya. Pada akhir tahun 2007, BEJ dan BES resmi bersatu menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Momentum ini menandai era baru pasar modal yang lebih terintegrasi, modern, dan menjadi simbol konsolidasi kelembagaan dalam menghadapi tantangan global (BEI, 2007).

Tantangan pertama yang dihadapi oleh BEI muncul pada tahun 2008 melalui Krisis Keuangan Global (KKG) yang dipicu krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Indonesia terdampak melalui volatilitas nilai tukar dan arus keluar modal asing (*capital outflow*). Bank Indonesia merespons dengan menaikkan *BI Rate* hingga 9,5% melalui *Inflation Targeting Framework* (ITF). Di pasar modal, IHSG anjlok tajam dan memaksa BEI menutup perdagangan

pada 8 Oktober 2008 setelah indeks meluncur turun lebih dari 10% (FAHMI, 2008).

Pada 11 Oktober 2008 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan kebijakan yang menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar. Selain itu, ia membuat kebijakan untuk menambahkan cadangan kas bank dan program penguatan ekonomi masyarakat melalui bantuan sosial serta mencurigai adanya praktik tak wajar seperti *short selling* serta rumor gagal bayar pada emiten grup tertentu. Di tengah tekanan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan dua program utama, yaitu proteksi rakyat (pangan, kesehatan, pendidikan) dan memastikan sektor riil tetap bergerak. Meskipun investasi domestik (PMDN) anjlok 41,62% dan terjadi risiko PHK, BEI tetap melakukan langkah strategis jangka panjang dengan meluncurkan sistem perdagangan baru *JATS–Next Generation* untuk meningkatkan volume transaksi (BPS, 2008).

Tahun 2009 menjadi titik balik pemulihan di mana IHSG tumbuh fantastis sebesar 86,98%, didukung membaiknya fundamental domestik. Memasuki 2010, ekonomi Indonesia tumbuh kuat 6,1%. Sektor riil mulai pulih yang ditopang oleh investasi non-bangunan dan perbaikan ekspor. Arus modal masuk (*capital inflow*) terutama yang berasal dari asing mendominasi investasi masuk di Indonesia, hal ini menghasilkan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sebesar \$30,3 miliar AS serta apresiasi Rupiah ke level Rp9.081 per dolar AS (BI, 2009).

BEI merespons momentum ini dengan penguatan infrastruktur non-teknis melalui pendirian *The Indonesia Capital Market Institute* (TICMI) pada 2010 sebagai pusat edukasi. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya di angka 6,5% dengan inflasi rendah 3,79%, yang membawa Indonesia meraih peringkat *investment grade*. Inovasi berlanjut dengan perubahan lantai perdagangan menjadi Galeri BEI dan penerapan *remote trading* yang lebih luas. Melalui integrasi edukasi, modernisasi infrastruktur, dan digitalisasi sistem

transaksi, BEI berhasil mengukuhkan perannya sebagai katalisator utama dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang pesat (BEI, 2013).

Kondisi ekonomi yang terus meningkat tercermin pada kinerja IHSG tahun 2013 yang mencapai rekor tertinggi di level 5.214,98 poin dengan kapitalisasi pasar menembus Rp5.082 triliun. BEI juga menerapkan kebijakan baru seperti memajukan jam perdagangan 30 menit lebih awal serta sesi *pre-closing* dan *post-trading*. Pada tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai aktif mengawasi pasar modal dan menerbitkan izin usaha bagi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) yang merupakan anak perusahaan BEI. Hal ini menandakan peran BEI sebagai lembaga penting untuk melindungi investor domestik.

Rentang waktu 2007 hingga 2013 adalah periode transformasi signifikan. BEI terbukti bukan sekadar penyelenggara perdagangan, tetapi katalisator kemajuan infrastruktur keuangan yang adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BEI dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas tersebut. Terinspirasi dari kajian Nola Velia Arizza (2015-2022) tentang pengaruh makroekonomi, penelitian ini menambahkan dimensi analisis internal dan kelembagaan. Studi ini memberikan perspektif komprehensif mengenai upaya BEI—mulai dari konsolidasi, teknologi JATS-NextG, hingga edukasi—yang secara kritis membentuk fondasi ketahanan ekonomi Indonesia di era globalisasi keuangan.

Kajian Rubensius Silalahi yang berjudul "Perkembangan Pasar Modal Dalam Pembangunan Nasional di Era Digitalisasi 1998 - 2018" menjadi inspirasi penting karena menyoroti betapa rentannya kinerja pasar modal (IHSG) terhadap perkembangan kemajuan teknologi dan kebutuhan investasi dalam proses pembangunan (Silalahi, 2025). Hal ini membuat peneliti ingin membahas lebih mendalam tentang peran kelembangan bursa efek indonesia sebagai *self regulatory organization* atau lembaga pelaksana pasar modal selama periode

2007–2013. Studi ini bertujuan untuk memberikan perspective komprehensif mengenai upaya dan inovasi BEI sebagai regulator dan operator pasar, mulai dari konsolidasi bursa, penguatan infrastruktur teknologi (JATS-NextG), hingga kebijakan edukasi dan perdagangan, yang secara kritis membentuk fondasi pertumbuhan dan stabilitas pasar modal nasional di saat kondisi keuangan global berdampak terhadap perkembangan pasar modal Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi BEI terhadap perkembangan pasar modal nasional, serta menjadi bahan kajian untuk memahami bagaimana inovasi kelembagaan pasar modal berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di era globalisasi keuangan.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

a. Pembatasan Spasial

Secara spasial, penelitian ini dibatasi pada wilayah kerja Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berkedudukan di Jakarta sebagai pusat kegiatan pasar modal nasional. Meskipun BEI memiliki jangkauan yang meliputi seluruh Indonesia melalui sistem perdagangan jarak jauh (*remote trading*) dan jaringan Galeri Investasi di berbagai daerah, fokus penelitian ini tetap diarahkan pada aktivitas dan peran kelembagaan BEI sebagai organisasi pusat yang mengatur dan mengembangkan pasar modal Indonesia dalam kurun waktu 2007–2013.

b. Pembatasan Temporal

Secara temporal, penelitian ini dibatasi pada kurun waktu 2007 hingga 2013. Tahun 2007 dipilih sebagai titik awal karena pada tahun tersebut terjadi penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menjadi tonggak penting penyatuan sistem perdagangan efek nasional dan awal kebangkitan pasar modal pascakrisis. Tahun 2008 menandai periode

penting ketika BEI menghadapi dampak krisis ekonomi global, tetapi tetap melakukan inovasi teknologi melalui peluncuran *Jakarta Automated Trading System–Next Generation (JATS-NextG)* untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi perdagangan saham.

Sementara itu, tahun 2013 dijadikan sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun ini BEI mendirikan pusat perlindungan dana investor yang akan memperkuat lingkungan pasar modal dalam negeri dan melindungi hak-hak investor serta memberikan rasa aman bagi pemodal dari risiko administratif atau kegagalan kustodian.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika arah kebijakan ekonomi Indonesia mempengaruhi pasar modal dalam rentang 2007-2013?
2. Bagaimana peran BEI dalam mendorong perkembangan dan stabilitas pasar modal Indonesia pada periode 2007-2013?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk Menjelaskan pengaruh kondisi ekonomi Indonesia beserta arah kebijakan pemerintah terhadap perkembangan pasar modal. Penelitian ini menyediakan konteks eksternal yang membentuk lingkungan kerja BEI.
- b. Untuk Menguraikan kegiatan dan inovasi kelembagaan yang dilakukan BEI, seperti penggabungan entitas , kegiatan pencatatan, pengawasan dan pengembangan produk pasar modal, seperti penerapan sistem *Jakarta Automated Trading System–Next Generation (JATS-NextG)*, serta pembentukan *The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)* dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investasi Efek Indonesia, serta aktivitas meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sejarah ekonomi Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan dinamika kelembagaan ekonomi modern seperti pasar modal. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan studi sejarah ekonomi yang menyoroti peran lembaga keuangan dalam pembangunan nasional.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktik dapat diterapkan sebagai bahan pendukung bagaimana masyarakat atau pelajar dapat memahami bagaimana perkembangan pasar modal di Indonesia sejak 2007-2013 dalam pandangan sejarah tidak terlepas dari kebijakan politik dan kondisi ekonomi global maupun Indonesia pada periode 2007-2013. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan refleksi historis yang mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik bagi para regulator dan pemangku kepentingan pasar modal di masa kini.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-naratif. Penelitian sejarah adalah riset yang meneliti fenomena sosial masa lalu yang berjarak waktu dari peneliti. Karena tidak dapat berinteraksi langsung dengan objek, peneliti memanfaatkan sumber tertulis, lisan, dan artefak untuk merekonstruksi peristiwa secara sistematis). Oleh karena itu, penelitian sejarah menggunakan metode khusus yang disebut metode sejarah. Metode ini merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang membantu peneliti dalam mengumpulkan sumber sejarah, menilai atau menguji sumber tersebut secara kritis, serta menyajikan hasil sintesisnya (umumnya dalam bentuk tulisan) sebagai hasil penelitian (Garrahan, 1957).

Tahap heuristik merupakan proses penelusuran dan pengumpulan sumber, data, serta informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, baik

berupa dokumen tertulis, sumber lisan, maupun artefak, sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Untuk memperoleh sumber tertulis, peneliti melakukan studi pustaka dari berbagai referensi yang relevan dengan tema kajian (Kuntowijoyo, 1995).

Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber sekunder melalui studi kepustakaan yang dilakukan di berbagai perpustakaan dan repositori akademik. Dari sumber-sumber sekunder ini, peneliti memperoleh literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perkembangan pasar modal Indonesia, transformasi kelembagaan keuangan, serta dampak kebijakan ekonomi terhadap sektor keuangan nasional.

Tahap kedua dalam metode sejarah adalah kritik atau verifikasi sumber, yaitu proses pengujian terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik. Verifikasi ini dilakukan dalam dua bentuk: *pertama*, menilai keaslian atau otentisitas sumber yang disebut kritik eksternal, dan *kedua*, menilai kredibilitas atau kebenaran isi sumber yang dikenal sebagai kritik internal (Kuntowijoyo, 1995).

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses menafsirkan dan memberikan makna terhadap fakta-fakta sejarah yang telah melalui tahap kritik. Pada tahap ini, peneliti tidak sekadar menyajikan fakta secara terpisah, tetapi berusaha mengaitkan setiap fakta agar membentuk suatu pemahaman yang utuh mengenai peristiwa masa lalu. Interpretasi menuntut peneliti untuk mampu melihat hubungan sebab-akibat, latar belakang, serta konteks sosial, politik, dan budaya dari fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan tidak parsial.

Tahap terakhir adalah historiografi, yakni penyusunan atau penulisan kembali peristiwa masa lalu berdasarkan rekonstruksi yang didukung jejak-jejak sejarah (Herlina, 2008). Dengan kata lain, historiografi merupakan penulisan kisah sejarah yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang telah dianalisis secara ilmiah

2. Bahan Sumber

Penelitian ini didukung oleh berbagai bahan sumber yang terdiri dari dokumen resmi lembaga pasar modal, arsip media, serta literatur akademik yang relevan dengan tema kajian. Dari sisi kelembagaan, terdapat sejumlah dokumen utama yang menjadi dasar analisis, yaitu *Laporan Tahunan Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2005 dan 2006*, serta *Laporan Tahunan Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007–2013*. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi mendalam mengenai kinerja keuangan, kebijakan strategis, perkembangan infrastruktur perdagangan, serta arah kebijakan BEI dalam membangun pasar modal nasional.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga memanfaatkan arsip media berupa *Media Pers BEI periode 2007–2013* yang berisi publikasi resmi, siaran pers, dan laporan kegiatan yang menggambarkan dinamika dan kebijakan pasar modal Indonesia selama periode tersebut. Selain itu, pemberitaan dari *Koran Tempo* tahun 2007–2013 turut dijadikan bahan sumber untuk memperkaya perspektif empiris mengenai perkembangan pasar modal, respon publik, serta situasi ekonomi nasional yang memengaruhi kinerja BEI.

Dengan memadukan dokumen resmi BEI dan BEJ sebagai sumber primer serta arsip media sebagai sumber pendukung, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan analisis yang komprehensif dan objektif mengenai peran Bursa Efek Indonesia dalam perkembangan pasar modal Indonesia pada kurun waktu 2007–2013.

Intelligentia - Dignitas